

Strategi FKUB dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan dan upaya dalam Merawat Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Keerom

Muhammad Irwan Putra¹, Zulrijal Bushido Gani², Ardio Bayu Endradi³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

correspondence e-mail*, Irwanputra150194@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/09/01;

Accepted: 2024/10/11; Published: 2024/11/28

Abstract

This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. The data that researchers obtained was based on the results of observations and interviews with informants. The results of the research show that the factors causing social religious conflict in Keerom Regency are social jealousy between indigenous communities towards immigrants in Papua (economic disparities, welfare, employment opportunities, etc.), regional election events, black campaigns containing SARA, egocentrism & personal/group aggressiveness in religion and religion. Differences in cultural value orientations and individual and group interests. Meanwhile, FKUB's steps for resolving conflict in Keerom Regency, namely FKUB, are strengthening consolidation and communication between various parties, including FORKOPIMDA, religious leaders, community leaders and traditional leaders, opening space for dialogue, deliberation and mediation to accommodate aspirations from various elements of society. Arbitration (settlement of problems outside of court). Meanwhile, efforts to maintain inter-religious harmony carried out by FKUB include increasing the intensity of socialization, dialogue & deliberation activities involving various elements of society in the district. Keerom. Carrying out socialization of peaceful campaigns in General Elections, Regional Head Elections which are vulnerable to the use of SARA issues in politics. Carrying out conflict resolution training for religious leaders and members of the FKUB, religious moderation socialization program for the community in Keerom district, maintaining routine meetings between religious leaders, community leaders & traditional leaders and encouraging continuous support from the Keerom Regional Government in efforts to maintain harmony between religious communities

Keywords

Strategy; FKUB; Religious Conflict; Harmony; Tolerance



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kabupaten Keerom adalah salah satu wilayah di Provinsi Papua dengan ragam penduduk yang memiliki latar belakang agama dan suku. Wilayah yang dulunya merupakan bagian daerah dalam program pemekaran dan transmigrasi di era presiden Soeharto. Hal tersebut menjadikan wilayah kabupaten Keerom memiliki latar belakang masyarakat dengan suku dan agama yang

beragam. Kabupaten Keerom merupakan salah satu wilayah di provinsi Papua yang secara garis besar merupakan wilayah pemekaran dari Kota Jayapura. Populasinya penduduknya pada tahun 2021 berjumlah 43.253 jiwa dengan latar belakang masyarakat dari suku, ras dan agama yang beragam. Masyarakat asli Papua dan pendatang yang telah berbaur sekian puluh tahun dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam menjaga kerukunan antar sesama masyarakat¹

Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari para pemuka agama dengan agama yang berbeda-beda hadir di tengah masyarakat sebagai simbol dalam gerakan merawat kerukunan antar umat beragama dan mencegah ataupun menyelesaikan berbagai potensi konflik keagamaan. Potensi konflik dapat berwujud dari berbagai aktivitas keagamaan dari masing-masing penganut agama yang memicu adanya persaingan kelompok keagamaan, politik, maupun kesenjangan ekonomi yang berpotensi menjadi konflik.²

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi damai yang lahir dari toleransi atas keberagaman agama. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai luhur lainnya. Namun di pihak lain, semangat keberagaman yang berlebihan dan kecenderungan fanatisme kelompok berdasarkan ras, suku, dan agama menjadi potensi yang menyebabkan timbulnya konflik, perpecahan dan bahkan melegitimasi kekerasan. Setiap wilayah memiliki konteks sosialnya masing-masing dan ancaman terhadap kerukunan dan perdamaian, tidak terkecuali di wilayah Papua. Empat ancaman utama menjaga toleransi dan perdamaian agama di Papua. Pertama ekstrimisme agama yang berlebihan, Kedua fanatisme suku, Ketiga Primordialisme etnis yang berlebihan; Keempat Marjinalisasi orang asli Papua dan perubahan sosial yang diakibatkan masifnya transmigrasi ke Papua. International Crises Group (ICG) dalam laporannya telah menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan konflik sosial di Papua diantaranya transmigrasi komunitas muslim dari wilayah lain di Indonesia ke Papua; munculnya kelompok-kelompok eksklusif dalam Islam dan Kristen yang memandang satu sama lain sebagai musuh; sisa-sisa Jihadis dari konflik Maluku yang menetap di beberapa kabupaten dan kota di Papua, seperti Jayapura dan Merauke; dan hasil pembangunan yang maju di wilayah lain di Indonesia dibandingkan dengan Papua. Salah satu contohnya pemicu konflik bisa berawal dari ekstrimisme

¹ Wildan Adi Rahman, "Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Sleman," *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2, no. 02 (2021): 237–60.

² Julsyaf Hanaviyah, "Komunikasi Lintas Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Bergama (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

dalam beragama dan ketimpangan sosial antar masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang. Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKBU) kabupaten Keerom yang terdiri dari beberapa tokoh-tokoh agama, hadir sebagai keterwakilan beberapa agama yang berbeda dihadapkan dengan persoalan dan konflik sosial yang kompleks, FKUB kabupaten Keerom saat ini dihadapkan dengan beberapa persoalan konflik sosial, seperti larangan pembangunan rumah ibadah oleh masyarakat adat asli Papua dan aksi protes dan desakan dari masyarakat untuk melarang aktivitas yang dilakukan oleh kelompok dari pengikut alm. Ja'far Umar Thalib, ex tokoh milisi jihadis pada konflik berdarah Ambon-Maluku. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan menjadi konflik yang skalanya lebih besar serta menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di kabupaten Keerom.³

METODE

Penelitian yang berupaya memberikan gambaran tentang fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan pada kondisi alamiah (natural setting) dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Perwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di kabupaten Keerom. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap narasumber atau informan di lapangan serta dalam analisa data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Konflik Sosial Keagamaan di Kabupaten Keerom

1. Keceburuan Sosial antar Masyarakat Pribumi terhadap Pendatang di Papua (kesenjangan Ekonomi, Kesejahteraan, Lapangan Kerja dll)

Program transmigrasi pemerintah yang dilakukan sejak di era tahun 80 an dengan menyasar wilayah Papua sebagai wilayah strategis sehingga akibat yang dirasakan sekarang dengan banyaknya penduduk pendatang yang berasal dari daerah dan suku yang beraneka macam didominasi oleh masyarakat suku jawa, sumatera dan Sulawesi memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesejahteraan social dan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang sangat baik ini menjadi boomerang baik penduduk local atau orang asli papua itu sendiri. Orang asli Papua mayoritas masih dalam keadaan dibawah garis kemiskinan, sulit mencari pekerjaan yang layak yang didasari pada kurangnya kemampuan dan keahlian maupun keterampilan yang

³ ROSYADI M ABDUL AZIS, "STRATEGI KOMUNIKASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KERUKUNAN ANTAR-UMAT BERAGAMA DI BANYUMAS." (IAIN Purwokerto, 2019).

dibutuhkan di dunia kerja. Budaya masyarakat pendatang, misalnya yang memiliki keterampilan bertani, berkebun, berniaga, berwirausaha atau hal lainnya yang tidak dimiliki oleh masyarakat orang asli Papua. Kesenjangan yang terjadi antara penduduk asli orang Papua dengan masyarakat pendatang yang jauh inilah yang menjadi akar penyebab konflik sosial. Masyarakat pendatang bisa mengalami perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial karena didukung oleh fasilitas pendidikan, keterampilan dan pengelolaan sumber daya alam yang difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya program transmigrasi, sedangkan sebagian besar masyarakat asli Papua yang tidak mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuan tersebut dikarenakan SDM yang tertinggal, kurangnya keahlian atau keterampilan.⁴

2. Event Pilkada, Black Campaign yang mengandung SARA

Pilkada sebagai sarana dalam memilih pemimpin daerah baik di level, kabupaten/kota, Provinsi menjadi salah satu ajang pesta rakyat yang seharusnya disikapi dalam pelaksanaannya dengan suka cita, berkompetisi dengan sehat, adu gagasan maupun program yang akan membangun kemajuan untuk masyarakat yang ada di kabupaten/kota serta provinsi. Hal ini berbanding terbalik pada perkembangan praktik demokrasi di Indonesia, pemilu atau pilkada pada perkembangannya telah terjadi distorsi tentang cara dalam berpolitik yang tidak sehat. Adanya saling serang di antara elit politik dengan black campaign yang digunakan untuk menyerang lawan politik. Tidak sampai di sana, black campaign tersebut sampai di lapisan masyarakat bawah, yang menciptakan pembelahan kelompok, perpecahan antar golongan di masyarakat. Keerom sebagai kabupaten di Provinsi Papua tidak terlepas dari hal tersebut, praktik pembelahan kelompok, beberapa upaya tersebut dapat dicegah oleh pihak Bawaslu Keerom yang berkerja sama dengan FKUB Keerom sebagai langkah pencegahan maupun kuratif, upaya memecah suara untuk merebut simpati dilakukan dengan orasi mengadung SARA, upaya mengkonsolidasi mengkampanyekan memilih pemimpin yang segologongan suku, agama dan etnis. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan perdamaian dan upaya merawat kerukunan antar umat beragama, bagaimana tidak untuk merebut simpati atau suara partisipan pemilih, mereka yang melakukan upaya pembelahan masyarakat itu yang diuntungkan sedangkan pada masyarakat keseluruhan yang dirugikan dengan pertikaian, permusuhan dan berkubu-kubu yang sangat menciderai persatuan dan keutuhan umat dan bangsa.⁵

⁴ Ayu Adila Saiful, "Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Surabaya," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018).

⁵ Husni Mubarak, "Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)," *Dialog* 37, no. 2 (2014): 195–1940

3. Egosentris & Agresivitas Personal/ Kelompok dalam beragama

Adanya kelompok suku baik pribumi dan pendatang yang dilihat sebagai mayoritas di daerah Papua juga menjadi salah satu faktor kuat pemicu konflik. Ego dari pribumi yang memiliki persepsi bahwa mereka adalah masyarakat asli Papua harus lebih dominan dan menguasai sumber daya alam, air, tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya punya hak besar atas wilayah Papua ini, sedangkan masyarakat pendatang dianggap sebagai masyarakat kelas terpinggirkan, atau masyarakat kelas bawah yang mencari hidup, menumpang hidup di Papua. Dari sudut masyarakat pendatang bahwa mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia, Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI maka sejalan dengan itu pula masyarakat pendatang memandang bahwa tidak masalah bagi mereka untuk hidup dan maju berkembang di wilayah yang dianggapnya sebagai bagian dari tanah air Indonesia sehingga mereka tidak setuju dengan adanya yang mengotak-kotakan atau pembeda antara masyarakat pendatang dan OAP (Orang Asli Papua), alasan ini yang digunakan untuk tetap hidup berdampingan dengan masyarakat Papua, hidup di Papua dan meninggal di kubur di tanah Papua, tapi dengan dominasi masyarakat pendatang yang lebih maju, sejahtera secara ekonomi, sosial dan politik inilah sehingga superioritas dan egosentris dan agresivitas personal atau kelompok tercipta yang mana hari ini di pusat-pusat pemerintahan lebih dominan oleh pendatang, yang menguasai perekonomian adalah masyarakat pendatang, bahkan hari ini tanah-tanah, hutan-hutan di Papua dieksploitasi oleh pendatang. Keadaan inilah yang menjadi polemik di Papua yang tidak terselesaikan dan menjadi bara di dalam sekam.

Langkah FKUB Penyelesaian Konflik di Kabupaten Keerom

1. Memperkuat Konsolidasi dan Komunikasi antar berbagai pihak di antaranya FORKOPIMDA, TOGA, TOMAS, TODAT.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh FKUB Keerom dalam penyelesaian Konflik di Kabupaten Keerom adalah dengan menggandeng berbagai pihak diantaranya FORKOPIMDA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat untuk bermusyawarah, berkoordinasi serta mengkomunikasikan guna membahas isu terbaru, hal urgent lainnya, menemukan resolusi bersama terkait permasalahan, konflik yang dihadapi sehingga adanya persamaan persepsi dan upaya bersama dalam penyelesaian suatu masalah yang ada di kabupaten Keerom. Dengan adanya kekompakan sebagai satu tim kerja akan berdampak pada efisiensi hasil kerja dan juga

pada upaya meminimalisir bahaya yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di kabupaten Keerom. hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan semua unsur dalam setiap pembahasan rapat koordinasi dan peninjauan bersama dalam rangkaian kegiatan utamanya dalam konsen pemeliharaan, upaya merawat kerukunan antar umat beragama yang ada di kabupaten Keerom.⁶

2. Membuka ruang dialog, musyawarah, dan Mediasi dalam menampung aspirasi dari berbagai unsur lapisan Masyarakat.

Keterlibatan unsur masyarakat dalam memberi aspirasi, masukan dan kritik terhadap isu yang berkembang di kabupaten Keerom sudah cukup baik sebagai bagian dari upaya menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama di kabupaten Keerom sudah difasilitasi oleh FKUB yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Pada tahun 2020 lalu jihadis Ja'far Umar Thalib bermukim di daerah Keerom dan mendirikan pondok pesantren, yang mana Ja'far Umar Thalib sebagai tokoh berpengaruh kelompok Islam pada saat pecah kerusuhan Ambon. Reaksi penolakan terjadi dan sempat membuat masyarakat dari berbagai lapisan turun ke jalan untuk berdemonstrasi untuk menolak kehadiran tokoh jihadis tersebut karena dikhawatirkan akan memprovokasi dan membuat konflik yang sama seperti di daerah Ambon dulu. Reaksi tanggap cepat dari FKUB dengan pemerintah yang melibatkan tokoh-tokoh agama menenangkan masyarakat dan bermusyawarah dan membangun kerjasama antar pihak untuk bersatupadu dalam memelihara kerukunan ini, sebagai contoh lainnya aksi pembakaran bangunan gereja yang dilakukan oleh orang tak dikenal di daerah Arso, Keerom memicu reaksi amarah dari pengikut persekutuan gereja GKI Simon Petrus pada tahun 2022, upaya pemerintah, FKUB dan seluruh stake holder lain bergerak cepat untuk meredam reaksi amarah masyarakat tersebut dan membuka ruang dialog dan musyawarah selain juga mengamankan pelaku pembakaran. Hal lain yang menjadi harmonis manakala di kabupaten Keerom setiap perayaan hari raya besar umat Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, banyak masyarakat dari agama Kristen, Hindu dan Budha yang ikut berpartisipasi membantu dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, keterlibatan masyarakat Islam yang membantu penyelenggaraan Misa Natal bagi umat

⁶ Ferdi Ferdian, "Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Pasaman Barat," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 4, no. 2 (2018): 136–47.

kritiani. hal ini sebagai perwujudan dari hasil diberikannya ruang dialog, musyawarah dan mediasi sehingga adanya rasa persaudaraan dan kekerabatan serta keakraban yang terbangun.⁷

Langkah FKUB dalam Upaya Merawat Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Menambah Intensitas Kegiatan Sosialisasi, Dialog & Musyawarah yang melibatkan berbagai unsur lapisan Masyarakat di Kab. Keerom.

Sebagai bagian dari langkah preventif atau pencegahan FKUB telah melakukan peningkatan Intensitas kegiatan sosialisasi, dialog dan musyawarah dengan berbagai lapisan masyarakat. Tentunya didukung oleh pemerintah daerah dari sisi anggaran dalam pelaksanaan program. Sosialisasi, dialog, dan musyawarah dilakukan untuk membahas isu-isu terkini dan hubungannya dengan kerjasama dan upaya pencegahan dan antisipasi yang terkoordinir secara baik, menyatukan persepsi dan juga dapat menyiapkan strategi dan langkah langkah secara matang. Misalnya saja saat menghadapi masa PEMILU/PEMILUKADA butuh koordinasi dan penyatuan persepsi sehingga kegiatan pesta rakyat tersebut dapat terselenggara dengan aman tertib dan lancar, hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dicegah dan diantisipasi dengan baik.

2. Melakukan sosialisasi Kampanye Damai dalam PEMILU, PILKADA yang rentan dengan penggunaan Isu SARA dalam politik.

Dalam upaya untuk mencegah dari pelaksanaan PEMILU, PILKADA yang berpotensi untuk memecah kesatuan dan persatuan antar umat beragama, FKUB sangat aktif dalam melakukan giat sosialisasi dan pengawasan langsung dengan bekerja sama dengan BAWASLU Kabupaten Keerom untuk memantau setiap kegiatan kampanye dan aktivitas politik setiap pasangan calon. Hal ini terbukti dalam penyelenggaraan PEMILU 2024 dan PILKADA 2024 sukses dilaksanakan dan setiap potensi-potensi isu SARA dalam praktik selama berkampanye dalam dihindari dan berdampak baik selama penyelenggaraan PEMILU maupun PILKADA dalam kondisi yang aman. Masyarakat tetap menyalurkan hak suara dengan bebas sesuai dengan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kapabilitas calon masing-masing. Situasi inilah yang diharapkan sebagaimana keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kondusif.⁸

3. Pelatihan Resolusi Konflik bagi Tokoh Agama maupun Anggota FKUB

⁷ I Wayan Kontiarta and Redi Panuju, "Strategi Komunikasi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 99–132.

⁸ Redi Panuju and I Wayan Kontiarta, "Strategi Komunikasi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali," *Commed Jurnal Komunikasi Dan Media* 3, no. 1 (2018): 1–22.

Perkembangan yang zaman yang modern dan seiring beraneka konflik yang berkembang sesuai zaman maka dibutuhkan cara atau metode dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang cara yang tepat. Dibutuhkan tokoh agama maupun anggota FKUB yang memiliki metode dan keahlian seperti cara berkomunikasi dan strategi dalam menyelesaikan masalah. Isu-isu terbaharukan yang menjadi tantangan untuk perdamaian masyarakat sehingga adanya pelatihan resolusi konflik menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. di tahun 2022 sampai sekarang, pemerintah sadar akan pentingnya hal ini sehingga melalui Kementerian Agama RI membuat program pelatihan resolusi konflik bagi para pemuka agama untuk menjadi bekal dalam menghadapi tantangan permasalahan yang sewaktu-waktu dapat mengancam kerukunan antar umat beragama. Kanwil Kementerian Agama RI Wilayah Provinsi Papua sudah mengimplementasikan program tersebut dan sejauh ini dirasakan cukup manfaatnya dengan adanya beberapa masalah yang dapat dicegah ataupun ditangani dengan tepat.⁹

4. Mendorong adanya dukungan secara kontinu dari Pemda Keerom dalam upaya merawat Kerukunan antar umat beragama.

Apa yang saat ini dicapai oleh FKUB dan pemerintah kabupaten Keerom dalam menjaga serta merawat kerukunan antar umat beragama di kabupaten Keerom sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan upaya pencegahan maupun langkah penyelesaian masalah yang dilakukan cukup berhasil, beberapa masalah ditangani dengan tepat dan program yang dilakukan dengan tepat dengan indikator keberhasilan yang mana keamanan dan ketertiban masyarakat berlangsung kondusif. Namun hal ini tidak boleh disikapi dengan rasa puas dan berhenti dan harus tetap dilakukan secara kontinu, keberlanjutan program ini harus terus dilakukan dan tentu harus didukung penuh oleh pemerintah daerah di kabupaten Keerom sehingga FKUB Kabupaten Keerom secara terus menerus berkomitmen untuk memelihara hubungan dengan semua stake holder yang ada baik FORKOPIMDA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama secara baik. sehingga kolaborasi ini dapat menjadi tolak ukur bagi setiap pemimpin di daerah sekalipun berganti pucuk pimpinan maupun berganti pengurus FKUB maupun berganti tokoh masyarakatnya, program baik ini akan berjalan sebagai suatu system yang akan menjaga perdamaian dan keutuhan masyarakat khususnya di kabupaten Keerom.¹⁰

⁹ Dita Khairiza and Muhammad Husni Ritonga, "Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama Di Kota Medan," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3283–95.

¹⁰ Nadia Wasta Utami, "Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 1 (2016): 61–72.

KESIMPULAN

Faktor Penyebab Konflik Sosial Keagamaan di Kabupaten Keerom diantaranya adalah Keceburuan Sosial antar Masyarakat Pribumi terhadap Pendatang di Papua (kesenjangan Ekonomi, Kesejahteraan, Lapangan Kerja dll), Event Pilkada, Black Campaign yang mengandung SARA dan Egosentris & Agresivitas Personal/ Kelompok dalam beragama. Langkah FKUB Penyelesaian Konflik di Kabupaten Keerom diantaranya dengan Memperkuat Konsolidasi dan Komunikasi antar berbagai pihak di antaranya FORKOPIMDA, TOGA, TOMAS, TODAT dan membuka ruang dialog, musyawarah, dan Mediasi dalam menampung aspirasi dari berbagai unsur lapisan Masyarakat. Langkah FKUB dalam Upaya Merawat Kerukunan Antar Umat Beragama yakni diantaranya dengan menambah Intensitas Kegiatan Sosialisasi, Dialog & Musyawarah yang melibatkan berbagai unsur lapisan Masyarakat di Kab. Keerom, melakukan sosialisasi Kampanye Damai dalam PEMILU, PILKADA yang rentan dengan penggunaan Isu SARA dalam politik, Pelatihan Resolusi Konflik bagi Tokoh Agama maupun Anggota FKUB serta mendorong adanya dukungan secara kontinu dari Pemda Keerom dalam upaya merawat Kerukunan antar umat beragama.

REFERENCES

- Ferdian, Ferdi. "Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Pasaman Barat." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 4, no. 2 (2018): 136–47.
- Hanaviyah, Julsyaf. "Komunikasi Lintas Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Bergama (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Khairiza, DIta, and Muhammad Husni Ritonga. "Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama Di Kota Medan." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3283–95.
- Kontiarta, I Wayan, and Redi Panuju. "Strategi Komunikasi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 99–132.
- M ABDUL AZIS, ROSYADI. "STRATEGI KOMUNIKASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KERUKUNAN ANTAR-UMAT BERAGAMA DI BANYUMAS." IAIN Purwokerto, 2019.

- Mubarok, Husni. "Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)." *Dialog* 37, no. 2 (2014): 195–206.
- Panuju, Redi, and I Wayan Kontiarta. "Strategi Komunikasi Fkub Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali." *Commed Jurnal Komunikasi Dan Media* 3, no. 1 (2018): 1–22.
- Rahman, Wildan Adi. "Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Sleman." *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2, no. 02 (2021): 237–60.
- Saiful, Ayu Adila. "Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Surabaya." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018).
- Utami, Nadia Wasta. "Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 1 (2016): 61–72.